

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI TINGKAT PENERAPAN
AKUNTANSI AKRUAL PADA PEMERINTAH**

**(Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Kudus)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

ETIKA SARI
NIM. 12030113130189

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2017**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Etika Sari

Nomor Induk Mahasiswa : 12030113130189

Fakultas/ Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ Akuntansi

Judul Skripsi : **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI TINGKAT
PENERAPAN AKUNTANSI AKRUAL
PADA PEMERINTAH
(Studi Empiris pada Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Kudus)**

Dosen Pembimbing : Prof. Dr. H. Abdul Rohman, SE., M.Si., Akt.

Semarang, 6 Oktober 2016

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. H. Abdul Rohman, SE., M.Si., Akt.

NIP. 196601081992021001

HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Etika Sari

Nomor Induk Mahasiswa : 12030113130189

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Skripsi : **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI TINGKAT
PENERAPAN AKUNTANSI AKRUAL
PADA PEMERINTAH (Studi Empiris
pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara Kudus)**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 18 Januari 2017

Tim Penguji

1. Prof. Dr. H. Abdul Rohman, S.E., M.Si., Akt. (.....)
2. Fuad., Ph.D (.....)
3. Drs. A. Santosa Adiwibowo., M.Si., Akt. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Etika Sari, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PENERAPAN AKUNTANSI AKRUAL PADA PEMERINTAH (Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kudus)**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 6 Oktober 2016

Yang membuat pernyataan

(Etika Sari)

NIM : 12030113130189

ABSTRACT

This study aims to examine the factors that affect the level of implementation of accrual accounting in local government. Independent variables used in this study is the educational level of finance staff, finance staff training, the quality of information technology, consulting support, experience of running a cash basis to the accrual, and the size of the labor force. While the dependent variable in this study is the degree of implementation of accrual accounting.

Collecting data in this study used questionnaire survey. The questionnaire were delivered to 88 proxy of budget users in a work unit- a work unit in the region of KPPN Kudus. A total of 66 questionnaires were returned and filled completed and they can be processed. The data collected were processed using multiple linear regression analysis.

The results of this study showed that the level of implementation of accrual accounting in government has not maximized. This is because the level of implementation of accrual accounting is significantly affected by the education level of the accounting staff, training of the accounting staff, the quality of information technology, consulting support, experience of running a cash basis to the accrual, and the size of the labor force. In addition, the level of implementation of accrual accounting can be a maximum when considering the effects of its application..

Keywords: accrual accounting, public sector accounting, government accounting, implementation level.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penerapan akuntansi akrual pada pemerintah daerah. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat pendidikan staf keuangan, pelatihan staf keuangan, kualitas teknologi informasi, dukungan konsultan, pengalaman menjalankan basis kas menuju akrual, dan ukuran satuan kerja. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat penerapan akuntansi akrual.

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan survey kuesioner. Kuesioner disampaikan kepada 88 Kuasa Pengguna Anggaran dari satuan kerja-satuan kerja di wilayah kerja kerja KPPN Kudus. Sebanyak 66 kuesioner kembali dan diisi dengan lengkap dan dapat diolah. Data yang dikumpulkan diolah dengan menggunakan analisis regresi linear berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat penerapan akuntansi akrual pada pemerintah belum maksimal. Hal ini dikarenakan tingkat penerapan akuntansi akrual dipengaruhi secara signifikan oleh pendidikan staff keuangan, pelatihan staff keuangan, kualitas teknologi informasi, dukungan konsultan, pengalaman menjalankan basis kas menuju akrual, dan ukuran satuan kerja. Selain itu, tingkat penerapan akuntansi akrual ini dapat maksimal ketika mempertimbangkan pengaruh-pengaruh untuk penerapannya.

Kata kunci :akuntansi akrual, akuntansi sektor publik, akuntansi pemerintahan, tingkat penerapan.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Perubahan tidak akan pernah terjadi jika kita terus menunggu waktu atau orang yang tepat. Kita adalah perubahan itu sendiri. (Barack Obama) ”

Skripsi ini saya persembahkan

untuk: Papahku tercinta (Eko Triyono, SH)

yang telah memberikan motivasi dukungan

dan doa, serta Ibu (Dra. Masrukah) yang

selalu memberi dukungan dan motivasi.

Adikku (Dwi Mustikaningrum)

yang selalu memberikan

motivasi. Semua pihak yang telah

memberikan semangat dan pelajaran

berharga dihidup penulis

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PENERAPAN AKUNTANSI AKRUAL PADA PEMERINTAH** (Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kudus)”. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam proses penyusunannya segala hambatan yang ada dapat teratasi berkat bantuan, doa, bimbingan, dorongan dan pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis akan menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang;
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Rohman, S.E., M.Si., Akt., selaku dosen pembimbing yang telah sabar membimbing, memberikan motivasi dan nasehat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar.
3. Bapak Fuad.,Ph.D. dan Agung Juliarto, S.E., M.Si., Akt., Ph.D. selaku Ketua dan Sekertaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
4. Bapak Andrian Budi Prasetyo SE, MSi, Akt. selaku dosen wali yang

senantiasa memberikan saran, motivasi, dan nasihat kepada penulis selama menjalani kuliah.

5. Segenap Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah mengajarkan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat.
6. Seluruh staf TU Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam proses perkuliahan.
7. Kepala Kantor dan seluruh pegawai KPPN Kudus yang telah membantu dalam penyebaran kuesioner penelitian ini.
8. Bapak/Ibu Kuasa Pengguna Anggaran dari satuan kerja-satuan kerja di wilayah KPPN Kudus yang telah bersedia menjadi responden.
9. Kedua orang tua tersayang, Ayah Eko Triyono, . SH dan Ibu, Dra. Masrukah yang selalu memberikan motivasi, kasih sayang, nasihat dan doa selama proses penyusunan skripsi.
10. Adik tercinta, Dwi Mustikaningrum, yang selalu memberikan dukungan dan doa.
11. Rahmat Hidayat yang selalu menjadi teman, kakak, dan sekaligus orang yang selalu memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
12. Sahabat-sahabat sejak SMA yang selalu mendengarkan keluh kesah saya dan memberikan masukan yang bermanfaat (Dila, Titis, Cantya, Aveen dan Awwal).
13. Thalliana Mutiara Citra, dan Irna Pratiwi yang selalu menjadi teman semasa kuliah, yang memberikan banyak motivasi dan masukan selama penulisan

skripsi.

14. Kos Villa Puspita : Kak Gayuh, Kak Tashia, Dhiah, dan Dewi atas motivasi dan kebersamaan selama ini.
15. Keluarga besar dan teman-teman Akuntansi 2013 UNDIP, yang telah memberikan kenangan terindah selama awal kuliah sampai dengan sekarang. Semoga kalian semua sukses dan relasi ini tetap terjalin.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan doa, bantuan dan dukungannya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan kurang sempurna karena keterbatasan waktu, pengetahuan dan pengalaman yang ada. Oleh karena itu setiap kritik, saran dan masukan sangat diharapkan penulis agar menjadi karya yang lebih baik lagi. Semoga skripsi ini bermanfaat dan memberikan informasi. Akhir kata, terima kasih atas dukungan yang diberikan dari berbagai pihak.

Semarang, 1 Oktober 2016

Penulis

Etika Sari

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
ABSTRAK.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1.3.1 Tujuan Penelitian	8
1.3.2 Manfaat Penelitian	9
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II TELAAH PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>).....	11
2.1.2 Teori Institusional.....	13
2.1.3 <i>NPM (New Public Management)</i>	14
2.1.4 Perkembangan Akuntansi Akrua di Indonesia	18
2.2 Penelitian Terdahulu	20
2.3 Kerangka Pemikiran	24
2.4 Pengembangan Hipotesis.....	28
2.4.1 Tingkat Pendidikan Staf Keuangan	28
2.4.2 Pelatihan Staf Keuangan.....	29
2.4.3 Kualitas Teknologi Informasi	30

2.4.4 Dukungan Konsultan	32
2.4.5 Pengalaman Menjalankan Basis Kas Menuju Akrual	32
2.4.6 Ukuran Satuan Kerja.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel.....	35
3.1.1 Variabel Dependen	35
3.1.2 Variabel Independen.....	37
3.1.2.1 Tingkat Pendidikan Staf Keuangan.....	37
3.1.2.2 Pelatihan Staf Keuangan	38
3.1.2.3 Kualitas Teknologi Informasi	39
3.1.2.4 Dukungan Konsultan.....	39
3.1.2.5 Pengalaman Menjalankan Basis Kas Menuju Akrual.....	40
3.1.2.6 Ukuran Satuan Kerja	41
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian.....	41
3.2.1 Populasi	41
3.2.2 Sampel	42
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	42
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	43
3.5 Metode Analisis Data	43
3.5.1 Statistik Deskriptif.....	43
3.5.2 Uji Non-Respon Bias	44
3.5.3 Uji Validitas.....	44
3.5.4 Uji Reliabilitas	45
3.5.5 Uji Asumsi Klasik	45
3.5.5.1 Uji Multikolonieritas.....	45
3.5.5.2 Uji Heteroskedastisitas.....	46
3.5.5.3 Uji Normalitas.....	46
3.5.6 Uji Hipotesis dengan Regresi Linear Berganda.....	46
3.5.6.1 Koefisien Determinasi (R ²)	47
3.5.6.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F).....	47
3.5.6.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t).....	48
BAB IV HASIL DAN ANALISIS.....	49
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	49
4.2 Analisis Data.....	51

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	51
4.2.2 Uji Non – Respon Bias	59
4.2.3 Uji Validitas.....	60
4.2.4 Uji Reliabilitas	63
4.2.5 Uji Asumsi Klasik	64
4.2.5.1 Uji Multikolinearitas	64
4.2.5.2 Uji Heterokedastisitas	65
4.2.5.3 Uji Normalitas.....	65
4.2.6 Analisis Regresi Linier Berganda.....	66
4.2.7 Pengujian Hipotesis	68
4.2.7.1 Koefisien Determinasi (R ²)	68
4.2.7.2 Uji Statistik F	69
4.2.7.3 Uji t (Uji Parsial).....	70
4.3 Interpretasi Hasil	73
4.3.1 Pengaruh Tingkat Pendidikan Staf Keuangan terhadap Tingkat Penerapan Akuntansi AkruaI	73
4.3.2 Pengaruh Pelatihan Staf Keuangan Terhadap Tingkat Penerapan Akuntansi AkruaI.....	74
4.3.3 Pengaruh Kualitas Teknologi Informasi Terhadap Tingkat Penerapan Akuntansi AkruaI	76
4.3.4 Pengaruh Dukungan Konsultan Terhadap Tingkat Penerapan Akuntansi AkruaI.....	77
4.3.5 Pengaruh Pengalaman Menjalankan Basis Kas Menuju AkruaI Terhadap Tingkat Penerapan Akuntansi AkruaI	79
4.3.6 Pengaruh Ukuran Satuan Kerja Terhadap Tingkat Penerapan Akuntansi AkruaI.....	80
BAB V PENUTUP.....	83
5.1 Simpulan.....	83
5.2 Keterbatasan	85
5.3 Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	95

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	22
Tabel 3.1 Indeks Tingkat Penerapan Akuntansi AkruaI	37
Tabel 4.1 Rincian Kuesioner.....	50
Tabel 4.2 Tipe Satuan Kerja.....	50
Tabel 4.3 Statistik Deskriptif Untuk Variabel Dependen	51
Tabel 4.4 Tingkat Penerapan Akuntansi AkruaI	52
Tabel 4.5 Statistik Deskriptif Untuk Variabel Independen	53
Tabel 4.6 Pelatihan Staf Keuangan	55
Tabel 4.7 Kualitas Teknologi Informasi	57
Tabel 4.8 Dukungan Konsultan atau Pembimbing Teknis	58
Tabel 4.9 Uji Respon Bias	60
Tabel 4.10 Tingkat Penerapan Akuntansi AkruaI	61
Tabel 4.11 Pelatihan Staf Keuangan	61
Tabel 4.12 Kualitas Teknologi Informasi	62
Tabel 4.13 Dukungan Konsultan atau Pembimbing Teknis	62
Tabel 4.14 Uji Reliabilitas	63
Tabel 4.15 Multikolinieritas.....	64
Tabel 4.16 Heterokedastisitas	65
Tabel 4.17 Normalitas	66
Tabel 4.18 Hasil Analisis Regresi Berganda	67
Tabel 4.19 Koefisien determinasi	68
Tabel 4.20 Hasil Uji Pengaruh Simultan (Uji F)	70
Tabel 4.21 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis	72

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	27

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Surat Ijin Penelitian	95
Lampiran B Surat Penerimaan Penelitian	96
Lampiran C Kuesioner Penelitian	97
Lampiran D Daftar Satuan Kerja Sampel	101
Lampiran E Output SPSS.....	103

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan reformasi pengelolaan keuangan pada organisasi sektor publik terus diupayakan oleh pemerintah untuk mencapai tata kelola keuangan yang lebih baik di lingkup pemerintahan. Perubahan-perubahan yang kolektif pada organisasi sektor publik ini dijadikan sebagai langkah-langkah perubahan kelembagaan, organisasi dan manajerial untuk mengarah ke sektor publik yang efisien dan efektif. Perubahan yang kolektif pada organisasi sektor publik ini dikategorikan sebagai NPM (*New Public Management*), NPM (*New Public Management*) sendiri dipandang sebagai cara untuk meningkatkan perencanaan, pengendalian, transparansi dan akuntabilitas di sektor publik.

Dalam hal reformasi NPM (*New Public Management*) di Indonesia merupakan sejalan dengan keadaan fiskal negara-negara ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) lainnya yang telah menjadi pendorong eksternal utama reformasi *New Public Management* (Yamamoto, 1999; Painter, 2006) dalam Judy Oliver (2012). Untuk mengatasi krisis ekonomi negara-negara ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) yang telah menerima bantuan dari lembaga internasional, seperti Bank Dunia (2002) dan Dana Moneter Internasional. Namun, kondisi pendanaan telah membawa negara untuk melaksanakan reformasi berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dengan reformasi *New*

Public Management (Atrey dan Armstrong, 2002; Bowornwathana, 2000; Hassan, 2005; Alawattage et al, 2007) dalam Judy Oliver (2012).

Minogue (2000) dalam Ciaran Connolly dan Noel Hyndman (2006) berpendapat bahwa pendekatan NPM (*New Public Management*) untuk manajemen keuangan sektor publik didasarkan pada pandangan bahwa birokrasi negara besar secara inheren itu boros. Oleh karena itu, untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja di sektor publik, maka perlu diadopsinya akuntansi berbasis akrual pada sektor publik dan terdapat beberapa bukti yang dapat ditemukan dalam adopsi akuntansi berbasis akrual, yaitu adanya perbaikan akuntabilitas nyata dari entitas sektor publik (Connolly dan Hyndman, 2006; Ter Bogt dan Van Helden, 2000; Arnaboldi dan Lapsley, 2008; Pollanen dan Loisselle-Lapointe, 2012).

Adanya perubahan pada sektor publik dalam hal perubahan sistem akuntansi dari berbasis kas menjadi akuntansi berbasis akrual. Hal tersebut dilandasi karena dalam sistem berbasis kas diklaim bahwa ada bias terhadap investasi modal (HM Treasury, 2001b) dalam Ciaran Connolly dan Noel Hyndman (2006) dan hal itu menegaskan bahwa informasi yang diberikan melalui akuntansi berbasis akrual memungkinkan keputusan yang lebih baik, serta informasi tentang keseimbangan antara pengeluaran saat ini dan modal dalam hal memperhitungkan biaya peluang modal dan konsumsi dari waktu ke waktu (Bevins, 1994; HM Treasury, 1994; Mellet, 1996) dalam Ciaran Connolly dan Noel Hyndman (2006).

Di sisi lain, tren ini menunjukkan bahwa sektor publik dalam hal kebijakan akuntansi di seluruh dunia telah memperlihatkan sedikit perhatian pada hambatan

potensial yang telah membuat penggunaan praktik swasta lebih berat biaya pelaksanaannya. Sejumlah kendala teknis dan kelembagaan telah diidentifikasi sebagai masalah utama yang telah memberi kontribusi pada kegagalan reformasi sektor publik di negara-negara berkembang (e.g. Mimba, Van Helden & Tillema 2007; Rahaman 2009; Sharma & Lawrence 2008) dalam Harun dan Kamase (2012). Di negara-negara berkembang masalah ini termasuk kurangnya kapasitas teknis, kurang dimanfaatkan informasi akuntansi untuk tujuan manajerial, juga praktik-praktik lama manajerial dan budaya (Mimba et al 2007; Rahaman 2009; Sharma & Lawrence 2008) dalam Harun dan Kamase (2012).

Di Indonesia sendiri, NPM (*New Public Management*) telah telah diadopsi sebagai bentuk reformasi di bidang keuangan negara, yang mana hal tersebut dimulai dengan adanya undang – undang bidang keuangan negara (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara). Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 36 (1) menyatakan penerapan peraturan akuntansi berbasis akrual dilaksanakan selambat lambatnya 5 tahun sejak dikeluarkannya dan selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas atau dengan kata lain pemerintah dapat menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual secara bertahap dengan ketentuan penerapan sepenuhnya paling lambat tahun anggaran 2015.

SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara adalah sebuah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah berbasis Akrua. Komponen Laporan Keuangan yang diamanahkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 terdapat 7 jenis laporan keuangan yaitu LRA (Laporan Realisasi Anggaran), Laporan Operasional, Laporan Perubahan SAL (Saldo Anggaran Lebih), Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan CaLK, sedangkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 hanya terdapat 4 Jenis Laporan Keuangan yaitu: LRA (Laporan Realisasi Anggaran), Neraca, Laporan Arus Kas dan CaLK.

Pemerintah diwajibkan untuk menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual paling lambat 5 tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang yang mengatur tentang Keuangan Negara, yang mana hal itu merupakan bunyi dari Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 pasal 36 (1). Dan sebagai pedoman pelaksanaannya maka diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, namun sampai batas waktu yang ditetapkan belum juga terealisasi dengan sempurna. Dan masih ada beberapa daerah yang masih tetap menggunakan CTA (*Cash To Accrual*), sehingga diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Dimana Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ini menggunakan akuntansi akrual yang dilaksanakan atau diimplementasikan pada tahun 2015.

Penelitian mengenai Akuntansi akrual di Indonesia yang dilakukan oleh Muhammad Indra Yudha K. (2013) yang menunjukkan bahwa kesiapan pemerintah

yang masih kurang atas penerapan Standar Akuntansi Pemerintah. Sementara penelitian sebelumnya di beberapa negara mengenai adopsi sistem akuntansi berbasis akrual pada organisasi sektor publik, menyatakan bahwa implementasi dari sistem akuntansi berbasis akrual sering disertai dengan sejumlah penghambat tingkat adopsi, yaitu antara lain masalah akuntansi, sumber daya manusia, organisasi dan keuangan, sehingga memang dalam transisi dari sistem akuntansi basis kas menuju basis akrual tidak akan terjadi secara cepat (Christensen, 2002;. Godfrey et al, 2001; Luder, 1992; Venieris dan Cohen 2004) dalam dalam Nikolaos Eriotis dan Filippos Stamatiadis dan Dimitrios Vasiliou (2011).

Hal-hal mengenai sejumlah permasalahan tentang tingkat adopsi itu diperkuat dengan adanya penelitian Jackson dan Lapsley (2003) dalam Judy Oliver (2012), yang menyebutkan bahwa adopsi praktik akuntansi baru dan teknik mungkin tidak berhasil tanpa potensi tentang inovasi yang relevan dengan kebutuhan organisasi. Serta kurangnya sumber daya, kurangnya staf yang diperlukan dan dana yang tidak mencukupi juga menjadikan sebagai sebuah hambatan untuk transisi ke akrual (Mimba et al., 2007) dalam Judy Oliver (2012), dan tidak hanya itu saja Harun (2007) dalam Judy Oliver (2012), menemukan bahwa reformasi akuntansi pemerintah di Indonesia terhambat oleh staf akuntansi pemerintah yang hanya memiliki pengalaman langsung dalam basis kas akuntansi. Selain itu, Venieris dan Cohen (2004) dalam Judy Oliver (2012) menyebutkan bahwa kurangnya staf akuntansi dan kurangnya perangkat lunak yang sesuai, maka akan memperlambat proses reformasi akuntansi.

Penelitian mengenai penerapan akuntansi akrual pada pemerintahan sangatlah sedikit di Indonesia, dan konsep akuntansi akrual di lingkungan pemerintah masihlah sangat baru, dan penerapan akuntansi akrual merupakan amanat undang – undang, oleh karena beberapa alasan tersebut maka perlunya penelitian tentang akuntansi akrual dilaksanakan. Di sisi lain, hasil penelitian yang dilakukan di berbagai negara juga belum sepenuhnya menunjukkan bukti akuntansi akrual dapat meningkatkan akuntabilitas di sektor publik (Connolly dan Hyndman, 2006; Ter Bogt dan Van Helden, 2000; Arnaboldi dan Lapsley, 2008; Pollanen dan Loisselle-Lapointe, 2012), dan hal itu diperjelas Dunleavy et al. (2005) yang menyatakan meskipun dengan adanya dampak NPM (*New Public Management*) yang dirasakan di banyak negara, namun tingkat penerimaan, penerapan dan penyebaran ternyata lebih lambat dan dalam kasus tertentu hal itu terbalik.

Akuntansi akrual dianggap penting untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pada organisasi sektor publik (Boston, 1987; Hood, 1995; Lapsley dan Wright, 2004; Lye et al, 2005) dalam Judy Oliver (2012). Namun pada kenyataannya terdapat beberapa faktor penghambat dalam adopsi akuntansi akrual, dan dalam hal ini maka perlu adanya pemahaman yang mendalam dalam hal faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan atau kegagalan. Faktor-faktor tersebut telah dijelaskan oleh beberapa penelitian terdahulu, yang mana seperti yang sudah dijelaskan diatas, diantaranya adalah faktor sumber daya manusia, faktor organisasional, dan faktor situasional. Faktor sumber daya yang dimaksudkan seperti tingkat pendidikan staf, pelatihan yang diberikan, dan latar belakang pendidikan pimpinan. Faktor organisasional adalah berkaitan tentang teknologi

informasi dan dukungan konsultan, sedangkan faktor situasional antara lain seperti pengalaman satuan kerja dalam menjalankan basis kas menuju akrual dan ukuran satuan kerja.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin menguji kembali sampai sejauh mana tingkat penerapan akuntansi akrual yang mana telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah berbasis Akrual dan menguji pengaruh dari faktor-faktor sumber daya manusia, organisasional dan situasional terhadap tingkat penerapan akuntansi akrual pada pemerintah. Penelitian terhadap penerapan akuntansi akrual pada tingkat satuan kerja dan pengaruh dari faktor-faktor tersebut diatas, diharapkan dapat memberikan bukti dan gambaran yang lebih nyata mengenai tingkat adopsi dan implementasi sistem akuntansi akrual pada pemerintah di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah tingkat pendidikan staf keuangan berpengaruh pada tingkat penerapan akuntansi akrual?
2. Apakah pelatihan staf keuangan berpengaruh pada tingkat penerapan akuntansi akrual?
3. Apakah kualitas teknologi informasi berpengaruh pada tingkat penerapan akuntansi akrual?

4. Apakah dukungan konsultan berpengaruh pada tingkat penerapan akuntansi akrual?
5. Apakah pengalaman menjalankan basis kas menuju akrual berpengaruh pada tingkat penerapan akuntansi akrual?
6. Apakah ukuran satuan kerja berpengaruh pada tingkat penerapan akuntansi akrual?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui hubungan antara tingkat pendidikan staf keuangan dengan tingkat penerapan akuntansi akrual.
2. Mengetahui hubungan pelatihan staf keuangan dengan tingkat penerapan akuntansi akrual.
3. Mengetahui hubungan teknologi informasi dengan tingkat penerapan akuntansi akrual.
4. Mengetahui hubungan dukungan konsultan dengan tingkat penerapan akuntansi akrual.
5. Mengetahui hubungan pengalaman menjalankan basis kas menuju akrual dengan tingkat penerapan akuntansi akrual.
6. Mengetahui hubungan ukuran satuan kerja dengan tingkat penerapan akuntansi akrual.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, antara lain:

1. **Bagi Peneliti**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan, wawasan dan pengalaman praktis bagi peneliti dalam menerapkan teori yang telah di dapat selama perkuliahan.

2. **Bagi Akademisi**

Sebagai bahan acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya dan diharapkan dapat menambah wawasan kepada akademisi.

3. **Bagi Pemerintah**

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pemerintahan yang menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Telaah Pustaka

Berisi landasan teori yang mendasari penelitian, membahas hasilhasil penelitian terdahulu yang sejenis, dan hipotesis penelitian, serta

kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan antar variabel penelitian.

BAB III : Metode Penelitian

Menguraikan deskripsi dari variabel-variabel penelitian, definisi operasional, penentuan sampel penelitian, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data penelitian, serta metode analisis data dan alat analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasannya.

BAB V : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.